

Judul : MKMK harus fokus pada etik hakim konstitusi
Tanggal : Kamis, 26 Oktober 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

MKMK Harus Fokus pada Etik Hakim Konstitusi

KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat ini tengah diadukan terkait dugaan pelanggaran etik. Anwar dilaporkan sejumlah elemen masyarakat atas dugaan pelanggaran etik dalam putusan MK yang pro pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pun dibentuk untuk mengusut dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim terkait putusan yang mengubah syarat capres cawapres. MKMK akan bertugas selama satu bulan.

Pakar hukum tata negara Fakultas Hukum UGM Andi Sandi Antonius Tabusasa Tonralipu menilai apa pun putusan MKMK harus lebih difokuskan pada etik hakim konstitusi. Bakal calon wakil presiden Mahfud Md meyakini tiga anggota MKMK yang telah dilantik merupakan sosok-sosok yang kredibel. "Sebelum MKMK itu dibentuk, saya pesimistis, ya, sebelum disebut namanya. Tetapi sesudah namanya disebut, ada Jimly, ada Bintang, ada Wahiduddin, menurut saya itu cukup kredibel," kata Mahfud.

Mahfud berharap tiga ang-

gota MKMK tersebut bisa menempatkan masalah pada proporsi yang tepat.

MKMK dijadwalkan menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam putusan perkara nomor 90/PUU XXI/2023 pada Kamis (26/10). Menurut Jimly Asshiddiqie, sidang perdana itu akan dibuka untuk umum dengan memanggil 10 pelapor. Jimly mengatakan sidang MKMK untuk pelapor dibuka untuk umum, sedangkan sidang untuk terlapor akan digelar secara tertutup. "Kami bikin terbuka saja, kecuali terlapor," tambah Jimly yang juga anggota DPD RI.

Jimly mempersilakan para pelapor untuk membawa ahli pada sidang tersebut. Selain itu, dia mempersilakan apabila masih ada masyarakat yang ingin mengajukan laporan.

Pada Selasa (24/10), Ketua MK Anwar Usman melantik tiga anggota MKMK, yakni Wahiduddin Adams dari unsur hakim konstitusi, Jimly Asshiddiqie dari unsur tokoh masyarakat, serta Bintang R Saragih dari unsur akademisi berlatar belakang bidang hukum. (Ykb/An/P-1)